FORUM PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
TAHUN 2026



H. ABDUL WAHID, M.Si
GUBERNUR RIAU



BAPPEDA PROVINSI RIAU
Pekanbaru, 30 April 2025



Ir. H. S.F. HARIYANTO, M.T
WAKIL GUBERNUR RIAU

GUBERNUR RIAU

Pekanbaru, 8 Januari 2025

Nomor : 000.7.2.4/Bappeda/ 80
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Eksemplar
Hal : Jadwal dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Riau

Yth. 1. Bupati/Walikota Se-Provinsi Riau;
2. Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Riau.

di –
TEMPAT

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bahwa dalam rangka proses Perencanaan Pembangunan Daerah agar berjalan efektif dan tepat waktu, maka dimintakan perhatian Saudara sebagai berikut :

1. Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Riau pada Tahun 2025 :
   a. **Forum Konsultasi Publik dijadwalkan pada Minggu II Februari 2025;**
   b. **Forum Perangkat Daerah dijadwalkan pada Minggu III Februari 2025 s.d. Minggu IV Februari 2025;**
   c. **Musrenbang Kabupaten/Kota dilaksanakan selambatnya Minggu II s.d. Minggu III Maret 2025;**
   d. **Forum Lintas Perangkat Daerah dijadwalkan pada Minggu III Maret 2025 s.d Minggu IV Maret 2025;**
   e. **Kortekrenbang Provinsi Riau dijadwalkan pada Minggu IV Maret 2025;**
   f. **Musrenbang Provinsi Riau dijadwalkan pada Minggu I April 2025.**
2. Setiap Perangkat Daerah Provinsi Riau agar menyusun rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 beserta Rencana Kegiatan (RK), berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pokok-Pokok Pikiran DPRD hasil reses serta hasil Koordinasi dengan kabupaten/kota, dan memperhatikan Proyek Strategis Nasional (PSN);
3. Dalam hal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, dimintakan kepada Bupati/Walikota agar dapat menyusun secara tepat waktu, sesuai peraturan perundangan dengan berpedoman pada RPJMD/RPD Kabupaten/Kota, Rancangan Awal RKPD Provinsi, RKP, Program Strategis Nasional, dan Pedoman penyusunan RKPD;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

PJ. GUBERNUR RIAU,

DR. RAHMAN HADI, M.Si

Tembusan: *Disampaikan Kepada Yth:*
1. Menteri Dalam Negeri
   Up. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Riau di Pekanbaru;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru;
4. Kepala Bappeda Provinsi Riau di Pekanbaru.

GUBERNUR RIAU

Pekanbaru, 26 Maret 2025

Kepada Yth :
1. Inspektur
2. Kepala Badan/Dinas
3. Sekretaris DPRD
4. Direktur Rumah Sakit
5. Kepala Satpol PP
6. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Riau

di –
PEKANBARU

SURAT EDARAN
NOMOR : 000.7.2.4/SE/BAPPEDA/2025/ 196

TENTANG
PEDOMAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN AWAL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Sesuai dengan amanat Pasal 83 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Pemerintah Provinsi Riau telah melaksanakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Riau Tahun 2025 pada hari **Rabu tanggal 12 Maret 2025.**

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar Kepala Perangkat Daerah dapat menyempurnakan rancangan awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan memperhatikan Rancangan Awal RKPD Tahun 2026;
2. Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah diinput kedalam Sistem SIPD RI sesuai jadwal terlampir;
3. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada prioritas, sasaran, indikator sasaran dan target, serta pagu indikatif sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, untuk dapat dijadikan pedoman dan dilaksanakan.

GUBERNUR RIAU,

ABDUL WAHID

Dasar pelaksanaan Forum PD Renja

- **Surat Edaran Gubernur Riau tanggal 8 Januari 2025 tentang Jadwal dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau**
- **Surat Edaran Gubernur Riau 26 Maret 2025 tentang Pedoman Penyusunan Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah 2026**

TUJUAN PELAKSANAAN FORUM PD RENJA 2026

PENGERTIAN FORUM PD

- Forum Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan Forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah untuk merumuskan program, kegiatandan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyrakat, dan dunia usaha (pemangku) kepentingan, serta wahana antar pihak.
- Membahas Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Bersama dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota se- Provinsi Riau dan pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dibawah koordinasi kepala Perangkat Daerah untuk mendapat masukan bagi penajaman dan penyempurnaan subtansi Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah

TUJUAN FORUM PD

1. Menyelaraskan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dengan usulan Program kegiatan dan sub kegiatan kabupaten/kota
2. Mempertajam indikator serta target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan PD Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi PD
3. Menyelaraskan program, kegiatan dan sub kegiatan antar PD Provinsi dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergisitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah
4. Menyesuaiakan pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing masing PD Provinsi

HASIL FORUM PD

BA Kesepakatan Pemangku Kepentingan Pelayanan Perangkat Daerah yang terdiri dari :

1. Program, kegiatan dan sub kegiatan dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari Forum Perangkat Daerah Provinsi Riau
2. Ranwal Renja PD 2026
3. Daftar usulan program, kegiatan dan sub kegiatan lintas PD dan lintas wilayah

HASIL PELAKSANAAN FPD MENJADI BAHAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN RKPD PROVINSI RIAU TAHUN 2026

Riau Bedelau

“RIAU BERBUDAYA MELAYU, DINAMIS, EKOLOGIS, AGAMIS DAN MAJU”

GAMBARAN UMUM

PROVINSI RIAU

DEMOGRAFI KEPENDUDUKAN PROVINSI RIAU, TAHUN 2024

Gambar Kepadatan Penduduk Provinsi Riau

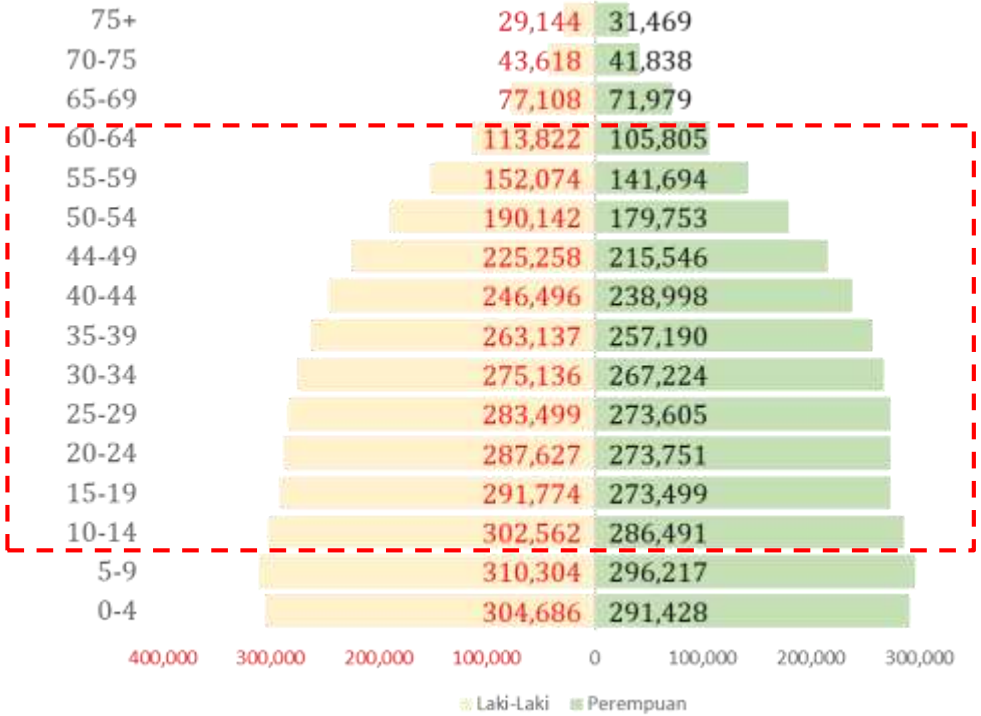


Luas Wilayah Riau (Km2) 89.935,89 (BPS 2023) dengan Jumlah Penduduk Riau sebanyak 6.728.100 Jiwa (BPS 2024)

Gambar Pertumbuhan Penduduk Provinsi Riau



Data Jumlah Penduduk Provinsi Riau Kelompok Umur 2023(BPS 2023)



- Terdapat kondisi **ketimpangan** antara **luas wilayah** dan **jumlah penduduk** di Kota Pekanbaru dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 1.620,89 jiwa/ Km² atau dengan persentase penduduk sebesar 15,25% dari total penduduk di Provinsi Riau pada Tahun 2024 berdasarkan sebaran dan distirbusi penduduk
- Laju pertumbuhan mencapai 1,35%, Peningkatan jumlah penduduk tentunya menjadi sumber kekuatan besar Sumber Daya Manusia yang maju untuk bisa dimanfaatkan dalam kontribusi pembangunan
- **Bonus demografi** dengan penduduk usia produktif (15-64 tahun) pada tahun 2023 sebesar 4.683.0170 jiwa (68,64%) dengan persentase angka rasio ketergantungan 45,80 %

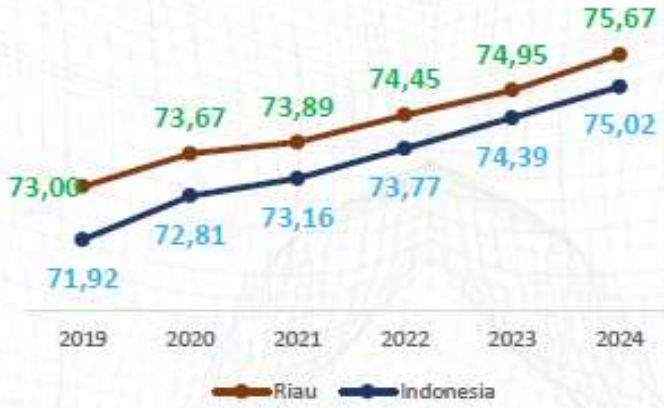
Sumber: BPS (2023) & Sensus Penduduk 2020

CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PROVINSI RIAU

PERTUMBUHAN EKONOMI



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA



KOMPONEN IPM



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan RIAU	11.255	10.675	10.736	11.158	11.448	11.857
Usia Harapan Hidup Riau	71,48	73,66	73,72	73,95	74,18	74,41
Harapan Lama Sekolah Riau	13,14	13,20	13,28	13,29	13,30	13,42
Rata-rata Lama Sekolah	9,03	9,14	9,19	9,22	9,32	9,43

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%)



TINGKAT KEMISKINAN (%)



GINI RASIO



Sumber : Badan Pusat Statistik

14

PERTUMBUHAN EKONOMI RIAU TAHUN 2024

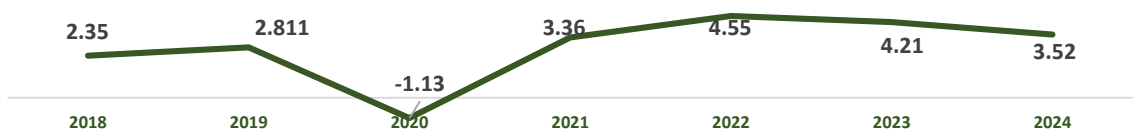
Berita Resmi Statistik No. 10/02/14/Th. XXVI, 5 Februari 2025



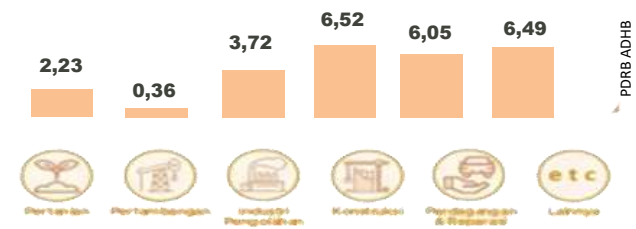
Q-TO-Q	Y-ON-Y	C-TO-C	PDRB HARGA BERLAKU Rp. 1.112,48 Triliun
0,16%	3,52%	3,52%	PDRB HARGA KONSTAN Rp. 571,23 triliun

- Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Pada tahun 2024 sebesar 3,52 % mengalami Kontraksi dari tahun 2023
- Pertumbuhan PDRB Riau menurut Lapangan Usaha Tahun 2024 terbesar di sektor Konstruksi sebesar 6,52% , Lainnya 6,49% perdagangan dan reparasi sebesar 6,05%
- Pertumbuhan PDRB Riau menurut pengeluaran terbesar pada Pengeluaran Komsumsi LNPRT Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga sebesar 13,01% dan Ekspor Luar negeri mengalami – 4,34%
- PDRB Provinsi Riau terbesar ke-5 nasional dan ke-2 di Sumatera setelah Sumetera Utara dengan kontribusi 1.112

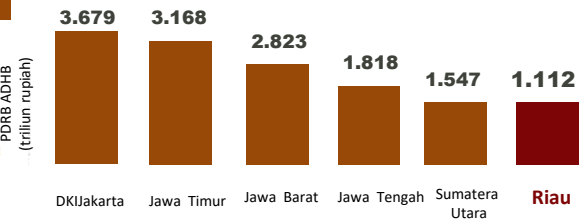
PERTUMBUHAN PDRB RIAU 2018-2024
(Persen)



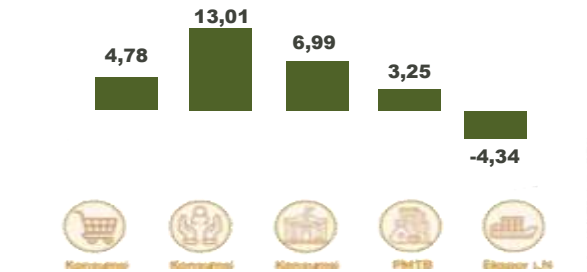
PERTUMBUHAN PDRB RIAU MENURUT LAPANGAN USAHA TAAHUN 2024 (c-to-c) (Persen)



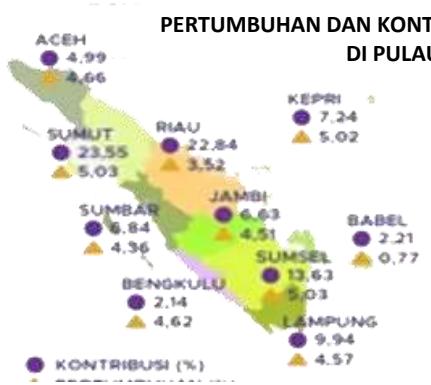
PROVINSI DENGAN PDRB TERBESAR SE - INDONESIA



PERTUMBUHAN PDRB RIAU MENURUT PENGELUARAN (c-to-c) (Persen)



PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PDRB DI PULAU SUMATERA

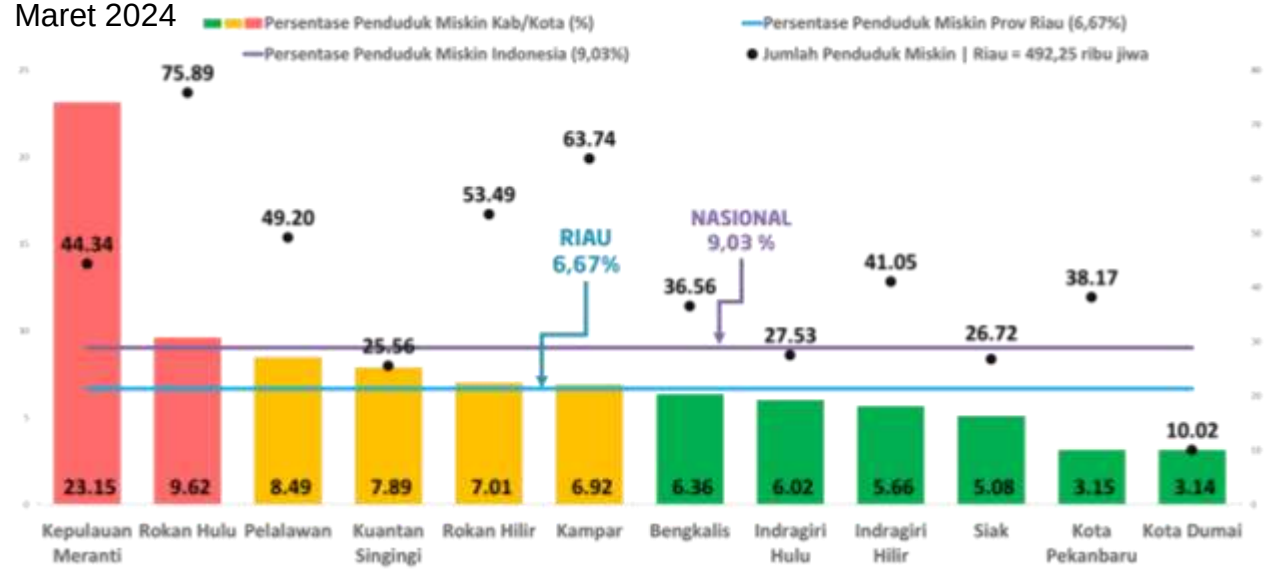


Sumber : Badan Pusat Statistik

KONDISI KEMISKINAN DAN KEMISKINAN ESKTREM PROVINSI RIAU

Angka Kemiskinan

Maret 2024

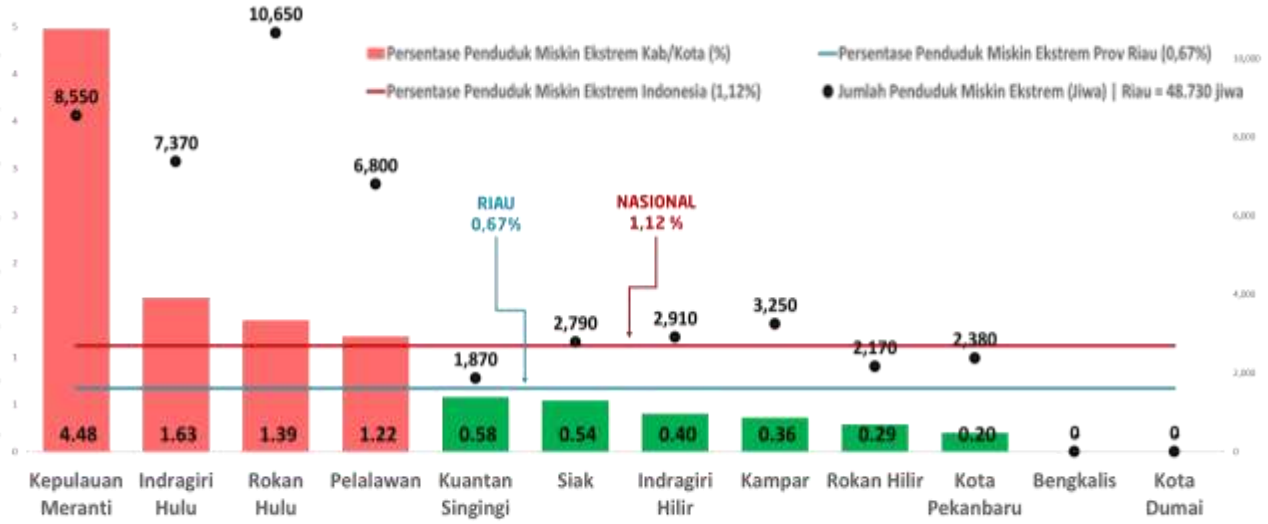


Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota (* Peringkat % Terendah Kab/Kota)	Persentase Penduduk Miskin (persen)		Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	
		2023	2024	2023	2024
14	**Provinsi Riau (13/38)**	**6,68**	**6,67**	**485,66**	**492,25**
1401	Kuantan Singingi (203/514)	8,07	7,89	26.10	25,56
1402	Indragiri Hulu (115/514)	6,06	6,02	27.40	27.53
1403	Indragiri Hilir (98/514)	5,64	5,66	40.86	41.05
1404	Pelalawan (226/514)	8,15	8,49	45.30	49.20
1405	Siak (75/514)	5,23	5,08	26.99	26,72
1406	Kampar (159/514)	7,04	6,92	63.84	63,74
1407	Rokan Hulu (266/514)	9,72	9,62	74.38	75,89
1408	Bengkalis (128/514)	6,31	6,36	36.10	36,56
1409	Rokan Hilir (169/514)	7,07	7,01	53.04	53.49
1410	Kepulauan Meranti (472/514)	22,98	23,15	43.82	44.34
1471	Kota Pekanbaru (15/514)	3,16	3,15	37.67	38,17
1473	Kota Dumai (13/514)	3,21	3,14	10.15	10,02

Angka Kemiskinan Ekstrem

(Posisi Relatif antar Kabupaten/Kota)

(Riau, Maret 2024: 0,43%)

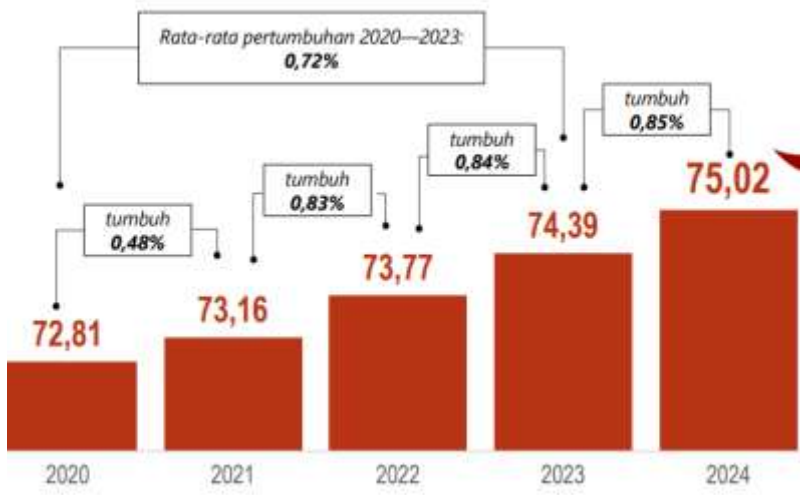


Kode	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Persentase Penduduk Miskin Ekstrem (Persen)			Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (Ribu Jiwa)		
		2021*	2022*	2023**	2021*	2022*	2023**
14	**Provinsi Riau**	**1,12**	**1,40**	**0,67**	**78,63**	**100,33**	**48,73**
1401	Kuantan Singingi	1,25	1,51	0,58	4.04	4.88	1,87
1402	Indragiri Hulu	0,32	2,49	1,63	1.43	11.15	7.37
1403	Indragiri Hilir	1,53	0,69	0,40	11,01	5,02	2,91
1404	Pelalawan	1,92	1,81	1,22	9,82	9,65	6,80
1405	Siak	0,95	1,27	0,54	4.73	6.42	2,79
1406	Kampar	1,00	1,73	0,36	8,77	15.45	3,25
1407	Rokan Hulu	2,07	1,90	1,39	14.86	14,08	10,65
1408	Bengkalis	0,70	0,60	0,00	3.99	3.40	0,00
1409	Rokan Hilir	0,98	2,06	0,29	7,09	15,16	2,17
1410	Kepulauan Meranti	6,39	5,53	4,48	12,06	10,50	8,55
1471	Kota Pekanbaru	0,00	0,34	0,20	0,00	4,01	2,38
1473	Kota Dumai	0,27	0,20	0,00	0,83	0,62	0,00

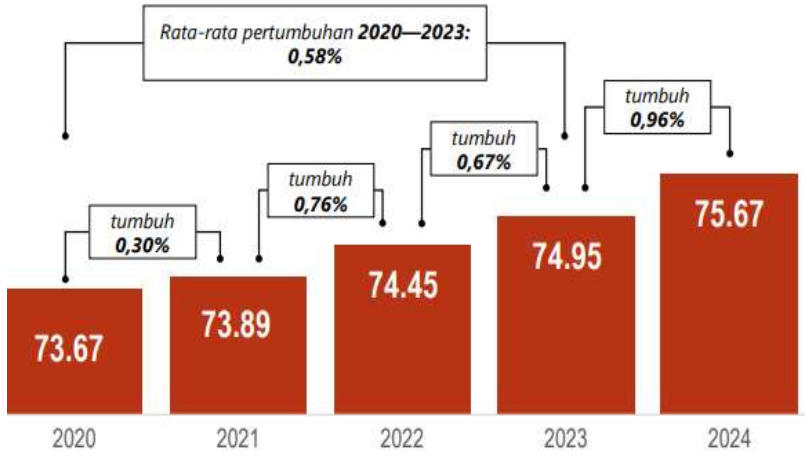
KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA

Provinsi	IPM		
	2022	2023	2024
(1)	(14)	(15)	(16)
Aceh	74,11	74,70	75,36
Sumatera Utara	74,51	75,13	75,76
Sumatera Barat	75,16	75,64	76,43
Riau	74,45	74,95	75,67
Jambi	73,11	73,73	74,36
Sumatera Selatan	72,48	73,18	73,84
Bengkulu	73,68	74,30	74,91
Lampung	71,79	72,48	73,13
Kep. Bangka Belitung	73,50	74,09	74,55
Kepulauan Riau	78,48	79,08	79,89
DKI Jakarta	82,77	83,55	84,15
Jawa Barat	73,63	74,24	74,92
Jawa Tengah	72,80	73,39	73,87
D.I. Yogyakarta	80,65	81,09	81,62
Jawa Timur	74,05	74,65	75,35
Banten	75,25	75,77	76,35
Bali	77,40	78,01	78,63
Nusa Tenggara Barat	71,65	72,37	73,10
Nusa Tenggara Timur	67,63	68,40	69,14
Kalimantan Barat	69,71	70,47	71,19
Kalimantan Tengah	73,17	73,73	74,28
Kalimantan Selatan	74,00	74,66	75,19
Kalimantan Timur	77,36	78,20	78,79
Kalimantan Utara	72,21	72,88	73,41
Sulawesi Utara	74,52	75,04	75,68
Sulawesi Tengah	71,01	71,66	72,24
Sulawesi Selatan	73,96	74,60	75,18
Sulawesi Tenggara	72,38	72,94	73,62
Gorontalo	70,62	71,25	72,01
Sulawesi Barat	69,19	69,80	70,46
Maluku	72,04	72,75	73,40
Maluku Utara	70,26	70,98	71,84
Papua Barat	66,03	66,84	67,69
Papua Barat Daya	68,60	69,07	69,65
Papua	72,57	73,23	73,83
Papua Selatan	67,39	68,24	68,86
Papua Tengah	58,76	59,44	60,25
Papua Pegunungan	52,69	53,45	54,43
Indonesia	73,77	74,39	75,02

Perkembangan IPM Indonesia, 2020-2024



Perkembangan IPM Riau, 2020-2024



- Kinerja Pembangunan dan peningkatan kualitas SDM diukur melalui Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- IPM Provinsi Riau tahun 2024 = 75,67 (tinggi)
  - Lebih baik dari rata-rata nasional = 74,39
  - Urutan ke-10 dari 34 propinsi, urutan ke-4 se-Sumatera
  - Meningkat dibanding tahun 2023 (74,95)
- Tren pertumbuhan IPM 2020-2024 = 0,58%, lebih rendah dari pertumbuhan IPM nasional 2020-2024 = 0,72%
- Kondisi kab/kota :
  - Tertinggi = Kota Pekanbaru 84,76 (sangat tinggi)
  - Terendah = Kep. Meranti 69,64 (sedang)
  - Gap = 14,62

Kabupaten/Kota	IPM (UHH LF SP2020)				
	2020	2021	2022	2023	2024
RIAU	73,67	73,89	74,45	74,95	75,67
Kuantan Singingi	72,12	72,40	72,78	73,35	74,00
Indragiri Hulu	70,98	71,25	71,69	72,28	72,75
Indragiri Hilir	68,43	68,49	69,12	69,64	70,07
Pelalawan	72,77	73,28	74,15	74,69	75,25
Siak	74,72	75,03	75,53	75,97	76,52
Kampar	74,23	74,41	75,21	75,59	76,29
Rokan Hulu	70,95	71,19	71,70	72,28	73,07
Bengkalis	74,49	74,60	75,38	75,96	76,37
Rokan Hilir	70,42	70,61	71,35	71,98	72,46
Kepulauan Meranti	67,39	67,59	68,31	68,96	69,64
Kota Pekanbaru	82,67	82,93	83,38	83,67	84,26
Kota Dumai	75,34	75,67	76,20	76,45	77,03

KONDISI IPM – ANTAR DAERAH

Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup Saat Lahir[1] (tahun)			Harapan Lama Sekolah (tahun)			Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kuantan Singingi	72,45	72,68	72,96	13,36	13,37	13,38	8,76	8,90	9,14
Indragiri Hulu	73,17	73,38	73,63	12,58	12,59	12,60	8,40	8,42	8,43
Indragiri Hilir	72,19	72,27	72,39	12,19	12,20	12,21	7,26	7,31	7,32
Pelalawan	74,16	74,37	74,63	12,68	12,90	12,91	8,72	8,73	8,96
Siak	73,52	73,72	73,98	12,85	12,86	12,89	9,87	9,88	9,92
Kampar	74,03	74,29	74,61	13,59	13,60	13,61	9,39	9,40	9,58
Rokan Hulu	73,56	73,59	73,67	12,86	12,88	12,94	8,55	8,81	8,94
Bengkalis	73,62	73,88	74,21	13,16	13,34	13,44	9,71	9,73	9,74
Rokan Hilir	73,46	73,64	73,87	12,83	12,88	12,89	8,28	8,52	8,53
Kepulauan Meranti	72,08	72,14	72,25	12,84	12,86	12,87	7,88	7,99	8,12
Pekanbaru	75,29	75,55	75,89	15,56	15,58	15,84	11,93	11,94	11,96
Dumai	73,18	73,31	73,50	13,32	13,33	13,35	10,15	10,16	10,29
Riau	73,95	74,18	74,41	13,29	13,30	13,42	9,22	9,32	9,43

Pengeluaran Riil per Kapita per tahun yang Disesuaikan (ribu rupiah)			IPM		
2022	2023	2024	2022	2023	2024
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
10.647	10.945	11.182	72,78	73,35	74,00
10.472	10.957	11.333	71,69	72,28	72,75
10.234	10.659	11.050	69,12	69,64	70,07
12.163	12.399	12.575	74,15	74,69	75,25
12.230	12.637	13.080	75,53	75,97	76,52
11.394	11.662	12.034	75,21	75,59	76,29
9.841	10.055	10.586	71,70	72,28	73,07
11.857	12.153	12.321	75,38	75,96	76,37
9.906	10.097	10.447	71,35	71,98	72,46
8.246	8.613	8.988	68,31	68,96	69,64
14.804	14.983	15.212	83,38	83,67	84,26
12.249	12.457	12.847	76,20	76,45	77,03
11.158	11.448	11.857	74,45	74,95	75,67

IPM 2024 :

- Tertinggi Kota Pekanbaru 84,26 (sangat tinggi)
- Rata2 IPM Kab/Kota kategori tinggi (10kab/kota)
- Terendah 2024 = Kep Meranti 69,64

Gap :

- Th 2024 = 14,62
- Th 2023 = 14,71
- Th 2022 = 15,07

- UHH tertinggi 2024 = Pekanbaru (75,89 th)
- UHH terendah 2024 = Kep. Meranti (72,25 th)

- HLS tertinggi 2024 = Pekanbaru (15,34 tn)
- HLS terendah 2024 = Indragiri Hilir (12,21 th)

- RLS tertinggi 2024 = Pekanbaru (11,96 tn)
- RLS terendah 2024 = Indragiri Hilir (7,32 th)

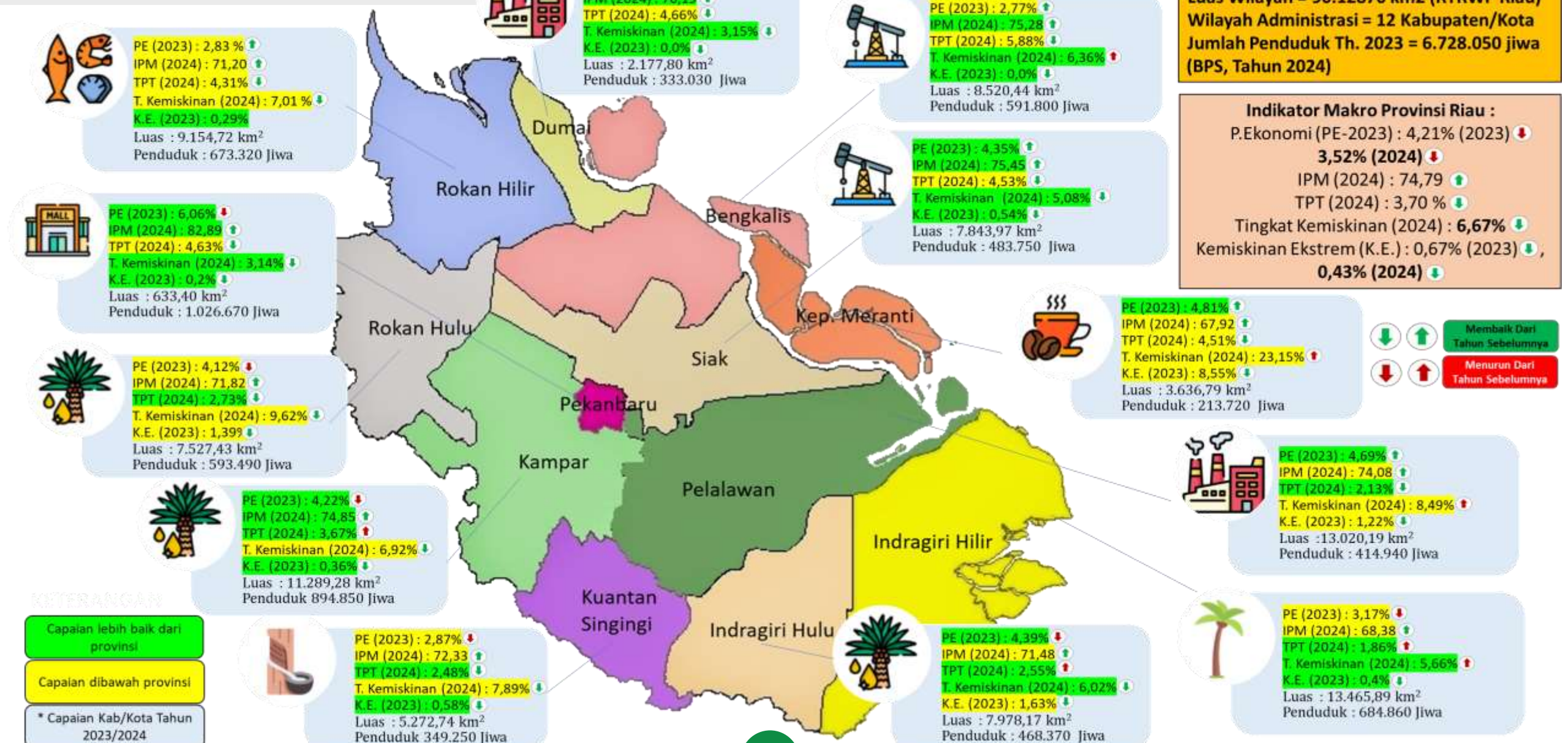
- Pengeluaran perkapita/th tertinggi 2024 = Pekanbaru (Rp.15.212 juta)
- Pengeluaran perkapita/th terendah 2024 = Kep. Meranti (Rp. 8.988 juta)

Status Capaian Pembangunan Manusia			
Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
IPM < 60	60 ≤ IPM < 70	70 ≤ IPM < 80	IPM ≥ 80

GAMBARAN UMUM INDIKATOR MAKRO KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI RIAU TAHUN 2024

Luas Wilayah = 90.12876 km2 (RTRWP Riau)
Wilayah Administrasi = 12 Kabupaten/Kota
Jumlah Penduduk Th. 2023 = 6.728.050 jiwa (BPS, Tahun 2024)

Indikator Makro Provinsi Riau :
P.Ekonomi (PE-2023) : 4,21% (2023)
3,52% (2024)
IPM (2024) : 74,79
TPT (2024) : 3,70 %
Tingkat Kemiskinan (2024) : **6,67%**
Kemiskinan Ekstrem (K.E.) : 0,67% (2023), **0,43% (2024)**



PE (2023) : 6,06%
IPM (2024) : 76,19
TPT (2024) : 4,66%
T. Kemiskinan (2024) : 3,15%
K.E. (2023) : 0,0%
Luas : 2.177,80 km²
Penduduk : 333.030 Jiwa

PE (2023) : 2,83 %
IPM (2024) : 71,20
TPT (2024) : 4,31%
T. Kemiskinan (2024) : 7,01 %
K.E. (2023) : 0,29%
Luas : 9.154,72 km²
Penduduk : 673.320 Jiwa

PE (2023) : 2,77%
IPM (2024) : 75,28
TPT (2024) : 5,88%
T. Kemiskinan (2024) : 6,36%
K.E. (2023) : 0,0%
Luas : 8.520,44 km²
Penduduk : 591.800 Jiwa

PE (2023) : 4,35%
IPM (2024) : 75,45
TPT (2024) : 4,53%
T. Kemiskinan (2024) : 5,08%
K.E. (2023) : 0,54%
Luas : 7.843,97 km²
Penduduk : 483.750 Jiwa

PE (2023) : 6,06%
IPM (2024) : 82,89
TPT (2024) : 4,63%
T. Kemiskinan (2024) : 3,14%
K.E. (2023) : 0,2%
Luas : 633,40 km²
Penduduk : 1.026.670 Jiwa

PE (2023) : 4,81%
IPM (2024) : 67,92
TPT (2024) : 4,51%
T. Kemiskinan (2024) : 23,15%
K.E. (2023) : 8,55%
Luas : 3.636,79 km²
Penduduk : 213.720 Jiwa

Membaik Dari Tahun Sebelumnya

Menurun Dari Tahun Sebelumnya

PE (2023) : 4,12%
IPM (2024) : 71,82
TPT (2024) : 2,73%
T. Kemiskinan (2024) : 9,62%
K.E. (2023) : 1,39
Luas : 7.527,43 km²
Penduduk : 593.490 Jiwa

PE (2023) : 4,69%
IPM (2024) : 74,08
TPT (2024) : 2,13%
T. Kemiskinan (2024) : 8,49%
K.E. (2023) : 1,22%
Luas :13.020,19 km²
Penduduk : 414.940 Jiwa

PE (2023) : 4,22%
IPM (2024) : 74,85
TPT (2024) : 3,67%
T. Kemiskinan (2024) : 6,92%
K.E. (2023) : 0,36%
Luas : 11.289,28 km²
Penduduk 894.850 Jiwa

PE (2023) : 3,17%
IPM (2024) : 68,38
TPT (2024) : 1,86%
T. Kemiskinan (2024) : 5,66%
K.E. (2023) : 0,4%
Luas : 13.465,89 km²
Penduduk : 684.860 Jiwa

PE (2023) : 2,87%
IPM (2024) : 72,33
TPT (2024) : 2,48%
T. Kemiskinan (2024) : 7,89%
K.E. (2023) : 0,58%
Luas : 5.272,74 km²
Penduduk 349.250 Jiwa

PE (2023) : 4,39%
IPM (2024) : 71,48
TPT (2024) : 2,55%
T. Kemiskinan (2024) : 6,02%
K.E. (2023) : 1,63%
Luas : 7.978,17 km²
Penduduk : 468.370 Jiwa

KETERANGAN

Capaian lebih baik dari provinsi

Capaian dibawah provinsi

* Capaian Kab/Kota Tahun 2023/2024

Riau Bedelau

“RIAU BERBUDAYA MELAYU, DINAMIS, EKOLOGIS, AGAMIS DAN MAJU”

RANWAL RPJMD PROVINSI RIAU TAHUN 2025-2029 (VISI MISI DAN PROGRAM PRIORITAS)

VISI RIAU 2025-2029

Riau yang **BERBUDAYA MELAYU, DINAMIS, EKOLOGIS, AGAMIS** dan **MAJU** **(RIAU BEDELAU)**

BERBUDAYA MELAYU

- Memahami dan mempedomani nilai-nilai budaya melayu dan kearifan lokal.
- Bersikap dan berperilaku sesuai nilai dan norma budaya melayu.





DINAMIS

- Mutakhir dan mudah melakukan perubahan untuk akselarasi pembangunan.
- Cepat beradaptasi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat.

EKOLOGIS

- Lingkungan terjaga dan Lestari.
- Pembangunan dan seimbang dan berkelanjutan.
- Menerapkan kaedah *green economic* menuju pada *blue economic*.





AGAMIS

- Menjadikan agama sebagai pondasi berkehidupan dan arah kebijakan pembangunan.
- Saling menghargai, menghormati dan menjaga toleransi antar umat beragama untuk persatuan.



MAJU

- Mandiri dan berdaya saing tinggi.
- Infrastruktur dan industri yang kuat dan handal.
- Ekonomi yang terus bertumbuh dalam lingkungan lestari.
- *Good and clean government* serta pelayanan masyarakat yang prima.
- Adaptasi teknologi, inovasi dan modernisasi.
- Pembangunan yang adil dan merata.
- Kemiskinan dan pengangguran yang terus berkurang.
- Masyarakat Aman, cerdas, sehat dan sejahtera untuk semua.

MISI RIAU 2025-2029 DAN PROGRAM PRIORITAS

MISI RIAU 2025-2029

1. **Membangun manusia yang sehat dan berkualitas melalui pelayanan Pendidikan dan kesehatan yang merata** dan berkeadilan serta keberpihakan pada disabilitas dan kelompol marjinal
2. **Meningkatkan perekonomian, daya saing dan kesejahteraan masyarakat** melalui pemanfaatan sumberdaya secara optimal dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan
3. **Memperkuat infrastruktur yang handal** guna kemudahan akses, pelayanan masyarakat dan perekonmian serta peningkatan konekifitas antar wilayah
4. **Memerangi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah** serta menjaga keseimbangan dan pemerataan pembangunan
5. **Mewjudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas** serta pelayanan publik yang berkualitas dengan dukungan aparatur yang berkompeten dan professional menuju **World Class Goverment**
6. **Memperkuat riset dan inovasi** serta kerjasama pembangunan guna akselarasi capaian pembangunan melalui public private partnership
7. **Mewujudkan kebudayaan melayu sebagai alat pemersatu dan mewujudkan nilai nilai kearifan lokal** serta mendorong kehidupan bermasyarakat yang kondusif, aman, nyaman dan adil untuk semua

PROGRAM PRIORITAS RIAU

- RIAU CERDAS
- RIAU SEHAT
- RIAU MANTAP
- RIAU BERDAYA SAING
- RIAU MEMBANGUN DESA MAJUKAN KOTA
- RIAU SEJAHTERA

PENJABARAN VISI DAN MISI RPJMD PROVINSI RIAU 2025 - 2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
(1)	(2)	(3)	(4)
Riau Berbudaya Melayu, Dinamis, Ekologis, Agamis dan Maju			
1. Membangun manusia yang sehat dan berkualitas melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkeadilan serta keberpihakan pada disabilitas dan kelompok marjinal	1.1 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Sehat, Cerdas, Kreatif, Unggul, Sejahtera dan Inklusi		Indeks Modal Manusia (indeks)
			Indeks Pembangunan Gender (indeks)
		1.1.1 Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)
			Harapan Lama Sekolah (tahun)
		1.1.2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Sehat dan produktif	Umur Harapan Hidup (tahun)
		1.1.3 Meningkatnya kesetaraan gender, kualitas keluarga, dan masyarakat inklusif	Indeks Ketimpangan Gender (indeks)
			Indeks Kualitas Keluarga (indeks)
2. Meningkatkan Perekonomian, Daya Saing dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemanfaatan Sumberdaya secara Optimal dalam Kerangka Pembangunan yang Berkelanjutan	2.1 Meningkatkan ekonomi yang berdaya saing		PDRB ADHB per kapita (juta rupiah pertahun)
			Pertumbuhan Ekonomi (persen)
		2.1.1 Meningkatnya Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (indeks)
		2.1.2 Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah dan kesejahteraan Petani	Indeks Ketahanan Pangan (indeks)
			Nilai Tukar Petani (NTP) (poin)
		2.1.3 Peningkatan daya saing investasi	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (triliun rupiah)
		2.1.4 Meningkatnya nilai tambah pariwisata	Jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara (rupiah)
	2.2 Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berwawasan Lingkungan dan Lestari		Indeks Ekonomi Hijau Daerah (indeks)
		2.2.1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indeks)
			Persentase Penurunan intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (persen)
		2.2.2 Mengurangi Risiko Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana Daerah (indeks)
3. Memperkuat Infrastruktur yang Handal Guna Kemudahan Akses, Pelayanan Masyarakat dan Perekonomian serta Peningkatan Konektifitas Antar Wilayah	3.1 Mewujudkan Infrastruktur yang handal		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (indeks)
		3.1.1 Meningkatnya Konektivitas Daerah	Rasio Konektivitas Simpul Transportasi (poin)
		3.1.2 Meningkatnya cakupan dan Kualitas layanan infrastruktur dasar	Indeks layanan infrastruktur dasar (indeks)
4. Memerangi Kemiskinan, Pengangguran dan Kesenjangan Antar Masyarakat dan Antar Wilayah serta Menjaga Keseimbangan dan Pemerataan Pembangunan	4.1 Menurunkan Angka Kemiskinan		Tingkat Kemiskinan (persen)
			Gini Rasio (poin)
		4.1.1 Berkurangnya Kesenjangan Antar Masyarakat dan Antar Wilayah	Persentase Penduduk Miskin Desa (persen)
			Presentase Penduduk Miskin Kota (persen)
		4.1.2. Meningkatkan Pemberdayaan, Produktivitas, dan Pendapatan Masyarakat	Tingkat Pengeluaraan Perkapita Masyarakat Miskin/Garis Kemiskinan (ribu rupiah)
			Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)
		4.1.3 Meningkatnya perlindungan Sosial yang Adaptif dan Inklusif	Persentase Penduduk Miskin yang memiliki setidaknya satu Jaminan Sosial dan bantuan Sosial (persen)
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berintegritas serta Pelayanan Publik yang Berkualitas dengan Dukungan Aparatur yang Kompeten dan Profesional menuju World Class Government	5.1 Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang baik		Indeks Reformasi Birokrasi (indeks)
		5.1.1 Meningkatnya budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional	Indeks Profesionalitas ASN (indeks)
			Nilai survey Indeks Berakhlak (poin)
			Nilai survey penilaian integritas (poin)
		5.1.2 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (indeks)
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (poin)
			Capaian akuntabilitas Kinerja (poin)
			Capaian akuntabilitas keuangan (Kategori)

Penjabaran Visi dan Misi

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
(1)	(2)	(3)	(4)
6. Memperkuat Riset dan Inovasi serta Kerjasama Pembangunan Guna Akselerasi Capaian Pembangunan melalui Public Private Partnership, Kerjasama Antara Daerah maupun Kerja Sama Global	6.1 Penguatan Ekosistem riset dan Inovasi serta Kerjasama Pembangunan Daerah		Indeks Inovasi Daerah (indeks)
		6.1.1 Meningkatnya hasil Riset dan Inovasi untuk pembangunan Daerah	Indeks Kapabilitas Inovasi (indeks)
		6.1.2 Meningkatnya Kerjasama Pembangunan	Persentase kerjasama pembangunan yang sudah dilaksanakan (persen)
7. Mewujudkan Kebudayaan Melayu sebagai Alat Pemersatu dan Perwujudan Nilai Nilai Kearifan Lokal serta Mendorong Kehidupan Bermasyarakat yang Kondusif, Aman, Nyaman dan Adil untuk Semua	7.1 Meningkatkan ketahanan sosial budaya mayarakat berlandaskan pada kebudayaan melayu yang agamis		Indeks Harmoni
			Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya (indeks)
		7.1.1 Menguatnya nilai-nilai budaya Melayu sebagai jati diri masyarakat Riau dalam rangka Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau	Indeks Pembangunan Kebudayaan (indeks)
		7.1.2 Meningkatnya Kerukunan Sosial Antar masyarakat dan Kehidupan Bermasyarakat yang Kondusif, Aman, Nyaman	Indeks kerukunan umat beragama (indeks)

IKK (SESUAI PEDUM LPPD 2024)

NO	URUSAN	IKK HASIL		sat
1	PENDIDIKAN	1	APS usia 16-18 th	%
		2	APS usia 4-18 th penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus	%
2	KESEHATAN	1	rasio daya tampung RS rujukan / 1000 penduduk	
		2	% RS rujukan provinsi terakreditasi	%
		3	% pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana / potensi bencana	%
		4	% pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak dan berisiko KLB provinsi	%
3	PUPR			
4	PERKIM	1	% WN korban bencana dan terkena relokasi akibat program pemda Provinsi memperoleh RLH	%
		2	% luas kawasan kumuh 10-15 Ha ditangani	%
		3	% satuan perumahan dilengkapi PSU	
5	TRANTIBUM	1	% gangguan trantibum yang diselesaikan	%
		2	% perda perkada ditegakkan	%
6	SOSIAL	1	% penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti	%
		2	% anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti	%
		3	% lansia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti	%
		4	% gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti	%
		5	% korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah prcvinsi	%
7	TENAGA KERJA	1	% Kab/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%
		2	% tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%
		3	tingkat produktrivitas tenaga kerja	
		4	% perusahaan yang menetapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	%
		5	% tenaga kerja yang ditempatkan (DN/LN)	%
		6	% perusahaan menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan (norma kebebasan bersertifikat, waktu kerja, pengupahan, jaminan sosial, perempuan, K3, yang disahkan OPD)	%
8	P3A	1	% ARG belanja langsung APBD	%
		2	rasio kekerasan terhadap anak / 10.000 anak	
		3	rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO / 100.000 perempuan	
9	PANGAN			
10	PERTANAHAN			
11	LH			
12	ADMINDUKCAPIL	1	% penyajian data kependudukan min 2 kali 1 thn	%
		2	% OPD memanfaatkan data kependudukan berdasarkan PK	%
13	PMD	1	% pengentasan desa tertinggal	%
		2	% peningkatan status desa mandiri	%
14	P2KB	1	TFR	
		2	% pemakaian kontrasepsi modren (prevalensi mCPR)	%
		3	unmet need KB	
15	PERHUBUNGAN			
16	KOMINFO			
17	KOP UKM			
18	PENANAMA MODAL			
19	PORA	1	tingkat partrisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	
		2	tingkat partrisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	
		3	peningkatan prestasi OR (medali event OR nas dan internas)	%
20	STATISTIK			
21	PERSANDIAN			
22	KEBUIDAYAAN	1	terlestarikannya cagar budaya	
23	PERPUSTAKAAN	1	tingkat kegemaran membaca masyarakat	
		2	indeks pembangunan literasi masyarakat	
24	KEARSIPAN	1	tingkat ketersediaan arsip	
		2	tingkat keberaadaan dan keutuhan arsip	
25	KP			
26	PARIWISATA			
27	PETANIAN			
28	KEHUTANAN			
29	ESDM			
30	PERDAGANGAN			
31	PERINDUSTRIAN			
32	PERENCANAAN dan KEUAnGAN	1	rasio belanja pegawai di luar guru dan nakes	%
		2	rasio PAD	%
		3	rasio belanja pemerintahan umum	%
		4	opini laporan keuangan	
33	PENGAWASAN	1	maturitas SPIP	
		2	peningkatan kapabilitas APIP	
34	PENGADAAN	1	% jumlah proyek konstruksi diteken pada Q1	%
		2	% Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%
		3	rasio nilai belanja melalui pengadaan metodce kompetetif	%
		4	peningkatan penggunan PDN dan proiduk UMKM pada PBJ pemda	%
35	KEPEGAWIAN	1	% PNS pendidikan tinggi ke atas (selain nakes dan guru)	%
		2	rasio pegawai fungsional bersertifikat kompetensi	%

Riau Bedelau

“RIAU BERBUDAYA MELAYU, DINAMIS, EKOLOGIS, AGAMIS DAN MAJU”

RANWAL RKPD
PROVINSI RIAU 2026

Pentahapan Pembangunan RPJMD

2026 (Tahun 1)	2027 (Tahun 2)	2028 (Tahun 3)	2029 (Tahun 4)	2030 (Tahun 5)
Perkuatan Fondasi Tranformasi dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah dan Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan	Pemantapan Pembangunan untuk Penguatan Daya Saing dan Ekonomi Inklusif	Meningkatkan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Daerah yang Kompetitif	Memantapkan Kesejahteraan Masyarakat, Pembangunan yang Seimbang dan Mandiri serta Berdaya SaingTinggi	Mewujudkan Riau yang Berbudaya Melayu, Dinamis, Ekologis, Agamis dan Maju (Riau Bedelau)

TEMA PROVINSI RIAU



TEMA

PERKUATAN FONDASI TRANFORMASI DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH DAN EKONOMI INKLUSIF YANG BERKELANJUTAN

TARGET RIAU TAHUN 2026

INDIKATOR MAKRO	TARGET
Indeks Modal Manusia (Poin)	0,57
Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	3,92 - 4,28
Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	3,12 - 3,52
Tingkat Kemiskinan (Persen)	4,95 - 5,86
Gini Rasio (Poin)	0,315 - 0,322
Penurunan intensitas emisi GRK (%)	48,62

Riau Bedelau

“RIAU BERBUDAYA MELAYU, DINAMIS, EKOLOGIS, AGAMIS DAN MAJU”

FOKUS ISU PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

BERSAMA INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045

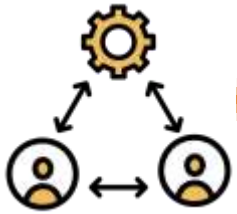
1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);





5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, dan ekonomi biru;





6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;

3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;





7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan;

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;





8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur;

URUSAN PERPUSTAKAAN (Asta Cita 4 dan 8)

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
1.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	73.6	72.00
2.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	75.4	70.00
3.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	73.6	72.00
4.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	75.4	70.00

URUSAN KEARSIPAN (Asta Cita 8)

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
1.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	70	98.05

TUJUAN	Meningkatnya literasi masyarakat		
INDIKATOR	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakt (IPLM)		
PROGRAM	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**KET.**
Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	
Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	
Akreditasi Perpustakaan dan Sertifikasi Pustakawan	Meningkatnya kualitas perpustakaan dan pustakawan	Persentase Pustakawan yang Memperoleh Sertifikasi Profesi dibidang Perpustakaan	

INDIKATOR PERPUSTAKAAN

TUJUAN	Meningkatnya tata kelola arsip
INDIKATOR	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Pengelolaan Arsip	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip	
Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	
Perizinan Penggunaan Arsip	Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	
Akreditasi dan Sertifikasi	Meningkatnya kapasitas SDM bidang kearsipan	Persentase SDM Bidang Kearsipan yang Ditingkatkan kompetensinya	

INDIKATOR KEARSIPAN

REKAPITULASI IPLM PROVINSI RIAU

NO	PROVINSI/ KAB/KOTA	UPLM1	UPLM2	UPML3	UPML4	UPLM5	UPLM6	UPLM7	SKOR IPLM 2024	SKOR IPLM 2023
1	PROVINSI RIAU	0,3503	0,4176	1,0000	0,0787	1,0000	1,0000	1,0000	69,24	66.88
2	Kab. Bengkalis	0,3137	0,0181	0,3248	0,0244	1,0000	0,0227	1,0000	38,62	53.86
3	Kab. Indragiri Hilir	0,1915	0,0407	0,9339	0,0518	1,0000	1,0000	0,0241	46,32	48,99
4	Kab. Indragiri Hulu	0,2924	0,2744	1,0000	0,0569	1,0000	1,0000	1,0000	66,05	60,88
5	Kab. Kampar	0,3397	1,0000	1,0000	0,1411	1,0000	1,0000	1,0000	78,30	56,70
6	Kab. Kepulauan Meranti	0,2747	0,2914	1,0000	0,1674	1,0000	1,0000	1,0000	67,62	63,19
7	Kab. Kuantan Singingi	0,4929	0,4658	1,0000	0,0213	1,0000	1,0000	1,0000	71,14	64,78
8	Kab. Pelalawan	0,3845	0,1040	1,0000	0,0523	1,0000	1,0000	1,0000	64,87	66,96
9	Kab. Rokan Hilir	0,1881	0,1167	0,1958	0,0374	1,0000	0,0026	0,0081	22,13	50,36
10	Kab. Rokan Hulu	0,2619	0,1590	0,2521	0,0449	1,0000	0,2281	0,3631	32,99	52,69
11	Kab. Siak	0,5286	0,2435	1,0000	0,0793	1,0000	1,0000	1,0000	69,31	70,06
12	Kota Dumai	0,4983	0,3069	1,0000	0,0947	1,0000	1,0000	1,0000	70,00	68,42
13	Kota Pekanbaru	0,6986	0,4296	1,0000	0,1150	1,0000	1,0000	1,0000	74,90	70,77

Sumber : Perpustakaan Nasional RI Tahun 2024

NILAI LAPORAN PENGAWASAN KEARSIPAN PROVINSI RIAU

Nilai Hasil Pengawasan	NHP 2021	NHP 2022	NHP 2023	NHP 2024	Bobot	NHP x Bobot Tahun 2021	NHP x Bobot Tahun 2022	NHP x Bobot Tahun 2023	NHP x Bobot Tahun 2024
Eksternal	77,32	81,61	89,04	89,94	60%	46,39	48,97	53,42	53,96
Internal	88,00	95,02	91,53	91,81	40%	35,20	38,00	36,61	36,73
Akumulasi						81,59	86,97	90,04	90,69

Sumber : ANRI RI Tahun 2024

TERIMA KASIH

BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
BAPPEDA PROVINSI RIAU